

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu organisasi yang didirikan seiring diberlakukannya UU No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan terus dilakukan evaluasi dan evolusi, selanjutnya reformasi pengelolaan Keuangan Negara oleh Pemerintah salah satunya ditetapkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik, (Reni Yendrawati, 2013).

Kualitas merupakan sesuatu yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa terdapat empat prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi

kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

Salah satu pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang di dasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan, 2011). Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya, (Silviana, 2014).

Menurut Sari (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi dan kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah bahkan organisasi tentang pemerintah.

Menurut Warsino (2008) Dalam pengelolaan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut di perlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang komponen tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, (silviana, 2014).

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian dari mulai proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, (Pemendagri No. 59 tahun 2007).

Sistem informasi akuntansi pada pemerintahan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang direvisi oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menerapkan sistem informasi keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah.

Seiring diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Menurut Wikinson *et al* (2000) dalam Elvin Andrianto (2107) Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commer*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Fenomena sistem informasi keuangan pemerintah merupakan suatu hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang di *download* dari internet. Bupati Bandung Barat, H. Abubakar mengaku kecewa mengetahui predikat penilaian yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Jawa Barat (Jabar) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2015 hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualia (WDP). Padahal, sejak dilaksanakannya penilaian oleh BPK RI perwakilan Jabar dirinya sangat mengharapkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Ada persoalan yang harus segera diselesaikan, karena sudah sejak 3 tahun terakhir predikat penilaian BPK ini tidak mengalami perubahan dan hanya bertahan di WDP saja. Seperti yang diketahui, pemerintahan Kab Bandung Barat sangat mengharapkan dan optimis mendapatkan predikat WTP, tapi harapan tersebut belum bisa terwujud.

Menurut, kepala BPK RI perwakilan Jabar Arman Syifa, salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam pemeriksaan terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan seluruh Kab/Kota masih berfokus pada permasalahan aset, baik akibat pengelolaannya yang belum baik maupun belum sesuai dengan jumlah data yang dimiliki. Dan tahun ini merupakan tahun pertama pemeriksaan laporan keuangan pemda dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, namun ternyata masih banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Karena hampir seluruh pemda ternyata belum siap 100 persen menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual ini.

Menurut Arman Syifa, ada banyak manfaat yang bisa diterima pemda dengan diaplikasikannya sistem ini, seperti memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemda, menyajikan terkait posisi hak dan kewajiban pemda dalam pengelolaan keuangan serta menyajikan informasi yang berkualitas tentang kinerja pemda. (Humas Setda KBB, 2016)

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus puas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Ini kelima kalinya Pemkab

Bandung Barat mendapatkan predikat WDP sejak dibawah kepemimpinan Abubakar-Ernawan pada tahun 2012 yang dilanjutkan Abubakar-Yayat sejak 2013.

Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya membenarkan hal itu. Maman Sunjaya menuturkan, penyebab meraih predikat WTP pada LKPD tahun lalu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni soal pengelolaan aset. Selain itu, masalah lainnya, yaitu pengeloan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Meski sudah bertahun-tahun, menurut Maman, masalah aset memang sulit diselesaikan. Sebab, hal itu membutuhkan penelusuran secara teliti jadi tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun kecuali kalau aset-aset itu dihapuskan. Tapi, tidak mungkin. Seperti yang diketahui, menjelang 10 tahun usiannya, Pemkab Bandung Barat masih memiliki ribuan aset yang belum memiliki sertifikat.

Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi dan Pembangunan KBB Kholid Nurjamil menilai, gagalnya Pemkab Bandung Barat meraih WTP menunjukkan tidak adanya progres yang dilakukan Pemkab terhadap rekomendasi sebelumnya, predikat yang diberikan BPK terhadap Pemkab Bandung Barat disalip oleh Kabupaten Pangandaran yang notabene daerah otonomi daerah yang lebih muda.

Dengan kondisi itu, Pemkab Bandung Barat meningkatkan terus kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pembuatan laporan keuangan harus sesuai

dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian, mereka akan mampu membuat laporan sesuai dengan kegiatan sesungguhnya. (Cecep Wijaya Sari,2017)

Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian adalah Teknologi Informasi dan Peraturan Perundang-undangan, faktor-faktor diluar organisasi yang tidak dapat dikendalikan. Variabel faktor eksternal ini dapat diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, *et al* (2003), terdapat dua indikator, yaitu : (1) KemajuanTeknologi Informasi, (2) Perubahan Perundnag-Undangan. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antar variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen yang kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderating itu sendiri.

Berdasarkan dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa organisasi tidak dapat menghindari dari adanya faktor-faktor diluar organisasi yang dapat berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi keuangan, hal ini tidak dapat dikontrol oleh organisasi itu sendiri seperti kemajuan teknologi informasi dan perubahan perundang-undnagan. Dalam kondisi ekonomi global, organisasi lebih terbuka pada organisasi lain atau negara lain. Faktor eksternal memang tidak dapat dikontrol, tetapi dapat diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Orang-orang dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada organisasi

Secara teori sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dan pemerosesan data keuangan. Menurut Barry E. Chusing dalam Midjan dan Susanto (2001) dan Widjajanto (2001) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen, (Nuredah Ragillita Untary dan Moh Dikdik Ardiyanto, 2015).

Menurut sukmaningrum (2012) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang (1) keandalan laporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Indriasari (2011) kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketidak signifikan ini mungkin disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di sub bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang

belum mendukung. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian intern menunjukkan berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, (Reni Yendrawati, 2013).

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Azhar, 2007). Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*), (Nuredah Ragillita Untary dan Moh Dikdik Ardiyanto, 2015).

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan informasi diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, (Reni Yendrawati, 2013).

Faktor eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana *strategic* dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output (Suprihatini, 2010). Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan kualitas sistem

informasi keuangan meningkat atau menurun. Organisasi tidak dapat menghindar dari adanya pengaruh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi itu sendiri, seperti kemajuan teknologi dan perubahan regulasi. Dalam kondisi ekonomi global, organisasi lebih terbuka pada organisasi lain atau negara lain. Faktor eksternal memang tidak dapat dikontrol, tetapi dapat diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut, (Nuredah Ragillita Untary dan Moh Dikdik Ardiyanto, 2015).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reni Yendrawati dengan judul penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating. Variabel yang diteliti oleh Reni Yendrawati ini adalah Sistem Pengendalian Intern (X_1), Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_2), Kualitas Sistem Informasi Keuangan (Y) dan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating (Z)

Penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia dengan faktor eksternal pada Dinas Keuangan Daerah, Kabupaten Bandung. Peneliti juga melakukan metode pengumpulan data dengan kuesioner agar pengambilan data lebih efisien dan data yang diterima lebih akurat dan konsisten berdasarkan realita yang terjadi di suatu organisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Faktor

Eksternal sebagai Variabel Moderasi” (Survei pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Jawa Barat (Jabar) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2015 hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2. Permasalahan dalam pemeriksaan terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan seluruh Kota/Kab masih berkuat pada permasalahan aset, baik akibat pengeloannya yang belum baik maupun belum sesuai dengan jumlah data yang dimiliki.
3. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari badan pemeriksaan keuangan. Hal ini menjadi kali kelima PemKab Bandung Barat mendapatkan predikat WDP sejak dibawah kepemimpinan Abubakar-Ernawan pada tahun 2012 yang dilanjutkan Abubakar-Yayat sejak 2013.
4. Belum adanya kesiapan pemda dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bagaimana kapasitas sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Bagaimana kualitas sistem informasi laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bagaimana kondisi faktor eksternal pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Seberapa besar pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Seberapa besar faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Seberapa besar pengaruh faktor eksternal memoderasi pengaruh kapasitas sumberdaya manusia terhadap kualitas sistem informasi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Seberapa besar pengaruh faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Seberapa besar pengaruh faktor eksternal memoderasi terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penelitian ini untuk mempelajari dan menilai pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui kapisitas sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui kualitas sistem informasi laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Untuk mengetahui kondisi faktor eksternal pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor eksternal memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia pada sistem informasi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pembangunan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi, terutama faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan seperti pada informasi laporan keuangan daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri tentang sistem pengendalian dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas sistem informasi laporan keuangan. Juga sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan tentang bagaimana ilmu dan teori yang kami dapat dibangku perkuliahan dapat memberikan kontribusi terhadap pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya

manusia terhadap keberhasilan kualitas sistem informasi laporan keuangan.

3. Bagi Pihak Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ged. B Lt.3 Jl. Padalarang-Cisarua km 2 Ds.Mekasari Kec.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan.